



RENSTRA BAPENDA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025





GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR **25** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
 1. Latar Belakang;
 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 3. Maksud dan Tujuan;
 4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelolmpok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b) Isu strategis.
 - c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat :
 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Memuat :
1. Uraian Program;
 2. Uraian Kegiatan;
 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- e. Bab V PENUTUP
- Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang meliputi perumusan masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kinerja penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Oleh karena itu dokumen Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Pendapatan Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan adanya Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat dilingkungan Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta dalam meningkatkan pelayanan di UPT Pendapatan Kabupaten/Kota demi tercapainya Pendapatan Daerah yang Optimal.

Palu, 18 September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



[Handwritten Signature]
Drs. SUKLANATA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670727 198603 1 005

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5 |
| 2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah..... | 5 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 7 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 8 |
| 2.4 Kelompok Sasaran layanan | 9 |
| 2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan..... | 9 |
| 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... | 10 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 13 |
| 3.1 Tujuan Perangkat Daerah | 13 |
| 3.2 Sasaran..... | 14 |
| 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD | 15 |
| 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD..... | 16 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 18 |
| 4.1 Uraian Program..... | 18 |
| 4.2 Uraian Kegiatan..... | 18 |
| 4.3 Uraian Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu indikatif..... | 58 |
| 4.4 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah | 99 |
| 4.5 Target keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) | 100 |
| 4.6 Target Keberhasilan Indikator Kinerja Kunci (IKK) | 100 |

BAB V PENUTUP101

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah..... | 7 |
| Gambar 3.1 | Konsep Renstra PD..... | 13 |
| Gambar 3.2 | Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra PD | 14 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 2.1 | Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan PNS dan PPPK..... | 7 |
| Tabel 2.2 | Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan | 8 |
| Tabel 2.3 | Sarana dan Prasarana..... | 8 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 9 |
| Tabel 2.5 | Teknik Menyimpulkan Isu-Isu Strategis PD..... | 8 |
| Tabel 3.1 | Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD..... | 15 |
| Tabel 3.2 | Penahapan RENSTRA PD | 15 |
| Tabel 3.3 | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD..... | 17 |
| Tabel 4.1 | Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA PD | 20 |
| Tabel 4.2 | Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan pendanaan | 59 |
| Tabel 4.3 | Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... | 99 |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Utama PD | 100 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Kunci PD | 100 |

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan penjabaran dari RPJPN dengan ini disusunlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD yang merupakan dokumen penjabaran visi, misi dan program-program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dokumen perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, program, arah kebijakan, isu – isu strategis dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan untuk Bidang Keuangan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sebagai langkah awal dalam menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dalam bentuk potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan telah melalui tahapan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 sudah selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

Substansi dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi gambaran pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; permasalahan dan isu strategis bidang keuangan pengelolaan pendapatan daerah; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya; serta IKU Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah beserta target kinerjanya.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2025-2045.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, tambahan lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168).

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Mewujudkan perencanaan bidang keuangan pengelolaan pendapatan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
- Menjabarkan arahan dan kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah melalui RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ke dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah;
- Menyediakan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan
- Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumberdaya aparatur secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
- Menjamin tersedianya rencana kegiatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;

2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Bapenda
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
 - e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah
2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas “Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain”.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program rencana kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan;
- b. Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendapatan terkait pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis terkait Pajak Daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain;
- e. Penyiapan pedoman dan standar pelayanan, pendaftaran pada pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- g. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- h. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- i. Penyusunan target dan realisasi realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- j. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- l. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

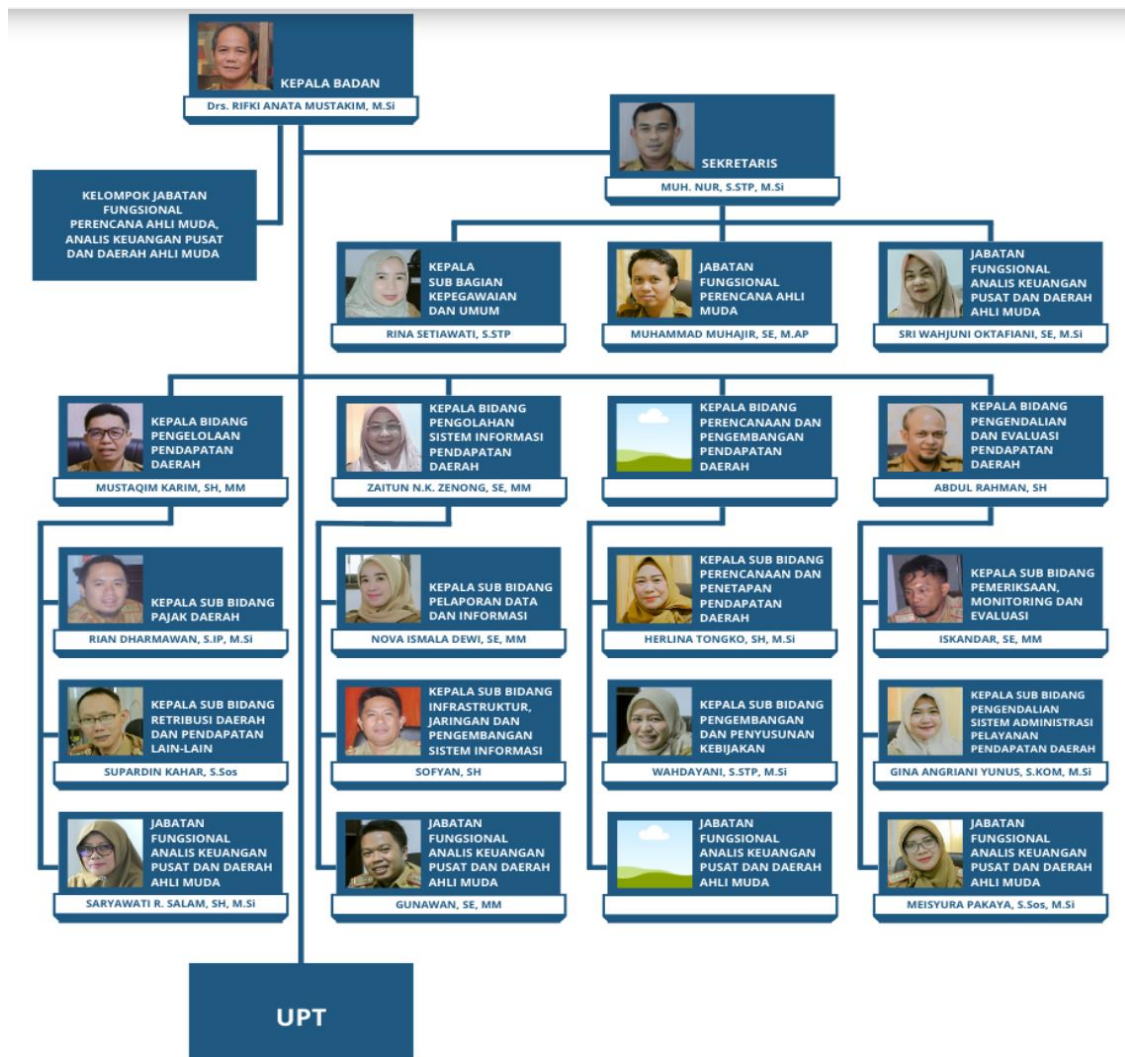
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi Badan Daerah, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan dengan kotak jabatan yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan membawahi :

- a. Sub bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 4. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi
 - b. Sub Bidang Infrastruktur
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - b. Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. UPT Badan.

Berdasarkan jenis jabatannya, jabatan fungsional menjadi bertambah karena dipengaruhi oleh adanya penyetaraan jabatan sekitar 6 (enam) orang yang dilaksanakan pada bulan Mei 2022, dimana sebanyak 6 (enam) orang pejabat Eselon IV telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebanyak 5 orang dan Perencana Ahli Muda sebanyak 1 Orang.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan Pegawai Organik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan berjumlah 472 (Empat ratus tujuh puluh dua) orang yang terdiri dari 62(enam puluh dua) pejabat struktural dan 404 (empat ratus empat) jabatan pelaksana serta 4 (empat) jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan 2 (dua) Perencana dengan kualifikasi pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan PNS dan PPPK

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------|----------|---------------|--------|-----------|
| | | Pria | Wanita | |
| 1. | II | 38 | 14 | 52orang |
| 2. | III | 84 | 89 | 173 orang |
| 3. | IV | 13 | 18 | 31 orang |
| 4. | V | 42 | 26 | 68 orang |
| 5. | IX | 78 | 70 | 148 orang |
| Total | | 255 | 217 | 472rang |

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------|------------|---------------|--------|-----------|
| | | Pria | Wanita | |
| 1. | SD-SMA | 88 | 47 | 135 orang |
| 2. | Diploma | - | 4 | 4 orang |
| 3. | S1 | 150 | 140 | 290 orang |
| 4. | S2 | 17 | 25 | 42 orang |
| 5. | S3 | - | 1 | 1 Orang |
| Total | | 255 | 217 | 472 orang |

Berdasarkan gambaran jumlah pegawai sebagaimana diuraikan di atas, secara kuantitatif sumber daya manusia aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup memadai dalam mengemban tugas sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini ditunjang dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana

| No | Sarana Prasarana | Unit | Ket |
|----|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Tanah Bangunan Kantor | 7.078 m ² | KIB A |
| 2. | Bangunan (Gedung) | 8 Unit | KIB C |
| 3. | Kendaraan Dinas Roda 4 | 19 Unit | KIB B |
| 4. | Kendaraan Dinas Roda 2 | 45 Unit | KIB B |
| 5. | Barang lainnya | 1.424 Unit | KIB B dan KIB D |

Dengan adanya perlengkapan sarana dan prasarana penunjang sangat membantu mobilitas guna terwujudnya capaian kinerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah diatas, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian. Urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejak perencanaan pengadaan ASN hingga ASN tersebut Pensiun.

Pencapaian target Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode sebelumnya (tahun 2021-2024) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah periode Tahun 2021-2024 mengalami beberapa kali perubahan karena target kinerja indikator telah tercapai dan perlu reuiu untuk menentukan kembali indikator kerjanya. Capaian kinerja selama periode 2021-2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

| No | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | CAPAIAN |
|----|------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|
| | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| 1 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | 28,34 | 36,97 | 30,47 | 38,25 | 30,57 | 37,87 | 40,00 | 38,07 | 95,18% (2024) |

2.4 Kelompok Sasaran layanan

Layanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, Pengusaha, serta masyarakat umum yang merupakan wajib Pajak yang membutuhkan informasi dan pelayanan terkait regulasi pendapatan pajak daerah maupun retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berperan penting dalam pengelolaan Pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mencari potensi pendapatan baik dari sisi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer pusat dan Pendapatan lain-lain. Memberikan dukungan pencapaian target pendapatan daerah dalam memenuhi anggaran pembiayaan belanja daerah provinsi. memastikan bahwa proses rekrutmen, pengembangan, dan penempatan pegawai berjalan dengan baik. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Pendapatan di 13 kabupaten/kota melayani masyarakat (wajib pajak) untuk melakukan pembayaran pajak (PKB, BBN-KB, PAP, dan Pajak Alat Berat). Dengan demikian, layanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya terbatas pada Masyarakat (wajib pajak), tetapi juga mencakup seluruh perangkat daerah yang memegang Aset kendaraan dinas Roda II maupun Roda IV demi tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mengedepankan prinsip koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini tercermin melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan di Kantor Samsat Bersama. Kehadiran Kantor Samsat Bersama bukan hanya sekadar pusat pelayanan administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga merupakan wujud nyata sinergi antarinstansi dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjalin kerja sama erat dengan Kepolisian Daerah serta PT. Jasa Raharja.

Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Daerah berperan dalam aspek registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penegakan hukum yang terkait dengan ketertiban berlalu lintas. PT. Jasa Raharja bertugas memberikan perlindungan dasar melalui program asuransi kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk jaminan sosial kepada masyarakat. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi utama dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang strategis.

Kolaborasi ini tidak hanya sebatas hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui pelayanan terpadu di Kantor Samsat Bersama, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu tempat, sehingga lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Sinergi ini pada gilirannya berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan basis penerimaan daerah, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Ke depan, kerja sama yang telah terjalin dengan Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja akan terus ditingkatkan, baik dari aspek kelembagaan, teknologi pelayanan, maupun penguatan regulasi, sehingga pelayanan di UPT Pendapatan Kantor Samsat Bersama semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan tidak hanya mendukung pencapaian tujuan Badan Pendapatan Daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah secara keseluruhan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai program-program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kewenangannya dalam bidang keuangan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, Pengelolaan Pajak Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, serta Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan dokumen RPJMD 2025-2029 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang lainnya, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.5 Teknik Menyimpulkan Isu-Isu Strategis PD

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat belum menjadi prioritas dalam menjamin mutu/kualitas pelayanan | | Peningkatan urbanisasi dunia | Perpindahan Ibu kota Negara | Capaian IKM Daerah perlu ditingkatkan | Dukungan sarana dan prasarana layanan serta konektivitas antar daerah yang belum merata |
| | Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pendapatan Daerah berbasis Digital belum Optimal | | Transformasi Digital dan Revolusi Industri | Perkembangan Teknologi Informasi | Minimnya pemahaman SDM terhadap sistem teknologi yang tersedia | Literasi Digital masih rendah |
| | Penerapan Manajemen ASN belum maksimal | | Globalisasi dan Mobilitas Tenaga Kerja | Kualitas dan Kompetensi ASN yang Belum Merata | Informasi peningkatan kompetensi pegawai belum merata | Kurangnya kesadaran ASN dalam meningkatkan kompetensinya |
| | Penganggaran/pembiayaan terhadap Sektor Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) minim | | Tata kelola Keuangan global | Kurs Rupiah menurun dan Inflasi tinggi | Efisiensi Anggaran fokus terhadap program prioritas Asta Cita | Prioritas Anggaran pada Pengelolaan Pendapatan belum optimal |
| | Masih kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak | | Geografis dan karakteristik daerah | sarana dan prasarana Infrastruktur antar wilayah di daerah belum merata | Penyebarluasan informasi/kebijakan pajak daerah belum optimal | Aksesibilitas jangkauan pelayanan Publik di daerah belum merata |

b. Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan hasil review dari permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana layanan serta konektivitas antar daerah yang belum merata.
2. Kurangnya dukungan operasional dalam pengembangan potensi pendapatan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

3. Aksesibilitas jangkauan pelayanan Publik di daerah yang sulit menyebabkan masyarakat kurang membayar pajak.
4. Kurang Optimalnya data base potensi dan sumber pendapatan daerah.
5. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.
6. Prioritas Anggaran pada Pengelolaan Pendapatan belum optimal.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

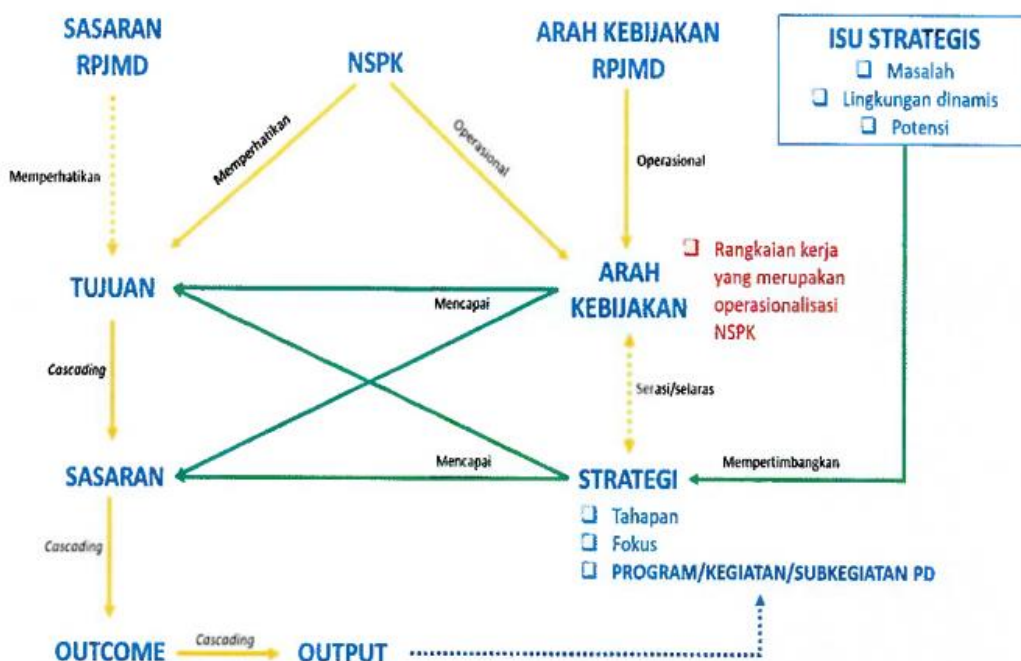
3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan tujuan dan sasaran fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (*outcome*) kinerja perangkat daerah yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

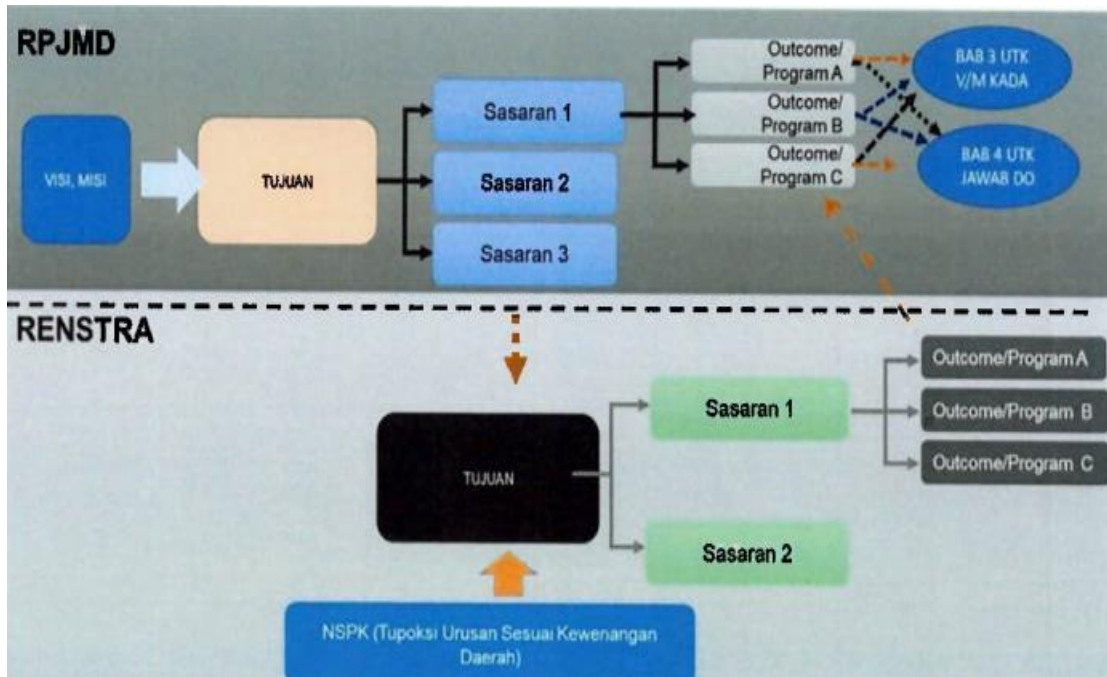
Dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi, maka sesuai tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mendukung untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 Visi Gubernur Sulawesi Tengah adalah **“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan Tahun 2025-2029”** dengan Misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan Sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan lokal.

**Gambar 3.1
Konsep Renstra PD**



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra PD



Dalam menterjemahkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung Misi ke 2 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”**.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Misi ke 2 yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan rencana strategis, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien. Sedangkan sasaran strategis jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Meningkatkan kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Meningkatkan kualitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator, yaitu Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta indikator kinerjanya disajikan sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|--|---|---|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| NSPK : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien | | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 38.79 | 39.21 | 39.57 | 39.85 | 40.04 | 40.23 | |
| Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Daerah | | Meningkatnya kualitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 0.58 | 8.40 | 12.30 | 11.90 | 11.67 | 11.52 | |

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Penetapan prioritas pembangunan daerah melibatkan berbagai tahapan yang sistematis untuk menentukan program dan kegiatan yang paling penting bagi pencapaian target pembangunan daerah. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah dan potensi daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, serta seleksi program prioritas yang relevan. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, serta meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun tahapan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Penahapan RENSTRA PD

| TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | TAHAP V |
|---|---|--|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pemetaan potensi sumber PAD baru dan optimalisasi basis data wajib pajak dan retribusi melalui digitalisasi layanan perpajakan daerah | Modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis elektronik (e-tax, e-retribusi) dan integrasi pembayaran dengan kanal digital nasional | Peningkatan kinerja BUMD melalui penajaman model bisnis, kemitraan swasta, dan diversifikasi produk/jasa unggulan daerah | Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset daerah melalui KPBU dan penyewaan aset daerah yang belum termanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan daerah | Integrasi sistem pengelolaan pendapatan daerah lintas sektor dengan analitik keuangan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal berkelanjutan |

Pada bab ini juga merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya yang di tempuh untuk mencapai Tujuan dan Sasaran. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah menetapkan strategi yaitu :

- Penyusunan Regulasi dan penetapan target PAD
- Peningkatan Pajak Daerah
- Penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan yang berbasis Digital

d. Penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah

Badan Pendapatan Daerah berfungsi sebagai lembaga pelaksana dalam mendukung tugas pemerintahan daerah, khususnya Urusan Keuangan dalam mengelola pendapatan daerah.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Keuangan, Adapun arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- Melakukan analisis dan pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah setiap tahun.
- Melakukan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah secara berkala.
- Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai digerai-gerai UPT Pendapatan.
- Melakukan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- Melakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah setiap tahun.
- Menyelesaikan Keberatan Pajak Daerah secara berkala.
- Melakukan Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah secara berkala.
- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Melakukan pelaporan dan pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025-2029 mendatang tercantum dalam Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|-----|--------------------------|--|--|------|
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) |
| 1 | | Peningkatan kapasitas dan intensifikasi pemungutan pajak serta retribusi | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah - Melakukan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah - Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai digerai-gerai UPT Pendapatan - Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | |
| 2 | | Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui inovasi ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. - Melakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah setiap tahun - Melakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah setiap tahun - Menyelesaikan Keberatan Pajak Daerah secara berkala. - Melakukan pelaporan dan pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. | |

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun program kegiatan yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.2 Uraian Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 tahun kedepan dalam kurun waktu 2025-2029 disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Adapun Uraian kegiatan yang disusun berdasarkan program kegiatan yang akan dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- A. Uraian Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang milik Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- B. Uraian Kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah hanya terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|--|---|--|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | | | |
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | | |
| | | | | | Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
| | | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 5.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 5.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) | 5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) | 5.02.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 5.02.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 5.02.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) | 5.02.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 5.02.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 5.02.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 5.02.01.1.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) | 5.02.01.1.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) | 5.02.01.1.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 5.02.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | |
| | | | | Tersedianya ASN yang berkompeten | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 5.02.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 5.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | |
| | | | | Tersedianya laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 5.02.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--|--|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | Persentase Realisasi PAD (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen) | 5.02.04.1.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | |
| | | | | Tersedianya Regulasi dan Penyuluhan Kebijakan PAD | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|--|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan | | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD Non Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0013 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | |
| | | | Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0014 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Penerimaan Pajak Daerah | | Laju Pertumbuhan Pajak Daerah (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Tersedianya Data Objek Pajak Daerah, Wajib Pajak Daerah serta Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan) | 5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen) | 5.02.04.1.01.0009 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | |
| | | | | Terpenuhinya pelayanan pajak daerah yang berkualitas | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana) | 5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Laporan) | 5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan) | 5.02.04.1.01.0011 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| 5.02.0.00.0.00.01.0001 - UPT Wil. I Palu | | | | | | | |
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
| | | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--|---|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| 5.02.0.00.0.00.01.0002 - UPT Wil. II Parigi Moutong | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|--|---|--|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5.02.0.00.0.00.01.0003 - UPT Wil. III Poso | | | | | | | |
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|--|---|--|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5.02.0.00.0.00.01.0004 - UPT Wil. IV Morowali | | | | | | | |
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.02.0.00.0.00.01.0005 - UPT Wil. V Banggai

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|--------|---------|---------|--------|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| 5.02.0.00.0.00.01.0006 - UPT Wil. VI Banggai Kepulauan | | | | | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|--|---|--|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| 5.02.0.00.0.00.01.0007 - UPT Wil. VII Toli-Toli | | | | | | | |
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.02.0.00.0.00.01.0008 - UPT Wil. VIII Buol

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.02.0.00.0.00.01.0009 - UPT Wil. IX Tojo Una-Una

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.02.0.00.0.00.01.0010 - UPT Wil. X Donggala

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | |
| | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.02.0.00.0.00.01.0011 - UPT Wil. XI Sigi

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.02.0.00.0.00.01.0012 - UPT XII. Morowali Utara

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|--------|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|--|--|--|
| | | | Pajak Alat Berat) | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.02.0.00.0.00.01.0013 - UPT XIII. Banggai Laut

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| - MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pemungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | |
|----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | |
| | | | | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.3 Uraian Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu indikatif

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sub kegiatan yang menunjang dari uraian kegiatan sehingga mencapai tujuan dari program kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan pendanaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | 85.781.412.949,91 | | 88.589.093.910,05 | | 95.070.984.211,84 | | 102.324.105.026,71 | | 110.461.136.381,77 | | |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 82.712.922.799,91 | | 83.217.401.995,43 | | 88.966.684.271,82 | | 95.343.726.119,05 | | 102.436.419.376,89 | | |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) | 51,84 | 53,61 | 76.062.735.183,91 | 55,38 | 77.460.276.232,43 | 57,15 | 82.957.792.544,82 | 58,92 | 89.078.789.923,05 | 60,69 | 95.912.316.355,89 | 5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | |
| 5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 632.698.261,77 | | 185.600.000 | | 200.448.000 | | 214.479.360 | | 229.492.914 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | 4 | 632.698.261,77 | 4 | 185.600.000 | 4 | 200.448.000 | 4 | 214.479.360 | 4 | 229.492.914 | | |
| | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 10 | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 178.465.461,77 | | 104.400.000 | | 112.752.000 | | 120.644.640 | | 129.089.764 | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 9 | 9 | 178.465.461,77 | 9 | 104.400.000 | 9 | 112.752.000 | 9 | 120.644.640 | 10 | 129.089.764 | | |
| 5.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 266.892.400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 266.892.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 127.126.400 | | 58.000.000 | | 62.640.000 | | 67.024.800 | | 71.716.536 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 0 | 4 | 127.126.400 | 4 | 58.000.000 | 4 | 62.640.000 | 4 | 67.024.800 | 4 | 71.716.536 | | |
| 5.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | 30.107.000 | | 11.600.000 | | 12.528.000 | | 13.404.960 | | 14.343.307 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 0 | 1 | 30.107.000 | 1 | 11.600.000 | 1 | 12.528.000 | 1 | 13.404.960 | 1 | 14.343.307 | | |
| 5.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 30.107.000 | | 11.600.000 | | 12.528.000 | | 13.404.960 | | 14.343.307 | | |
| Terseleenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 0 | 1 | 30.107.000 | 1 | 11.600.000 | 1 | 12.528.000 | 1 | 13.404.960 | 1 | 14.343.307 | | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 67.104.272.950 | | 70.699.017.711,43 | | 76.000.204.483,82 | | 81.856.184.063,05 | | 88.426.107.317,89 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) | 268 | 480 | 67.104.272.950 | 510 | 70.699.017.711,43 | 502 | 76.000.204.483,82 | 490 | 81.856.184.063,05 | 480 | 88.426.107.317,89 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 14 | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| 5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 65.781.412.950 | | 69.693.993.711,43 | | 74.851.881.238,82 | | 80.627.478.191,05 | | 87.111.392.034,89 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) | 268 | 480 | 65.781.412.950 | 510 | 69.693.993.711,43 | 502 | 74.851.881.238,82 | 490 | 80.627.478.191,05 | 480 | 87.111.392.034,89 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1.196.400.000 | | 923.824.000 | | 1.060.627.245 | | 1.134.871.152 | | 1.214.312.133 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 1.196.400.000 | 12 | 923.824.000 | 12 | 1.060.627.245 | 12 | 1.134.871.152 | 12 | 1.214.312.133 | | |
| 5.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 116.460.000 | | 69.600.000 | | 75.168.000 | | 80.429.760 | | 86.059.843 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 14 | 14 | 116.460.000 | 14 | 69.600.000 | 14 | 75.168.000 | 14 | 80.429.760 | 14 | 86.059.843 | | |
| 5.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 10.000.000 | | 11.600.000 | | 12.528.000 | | 13.404.960 | | 14.343.307 | | |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 0 | 2 | 10.000.000 | 2 | 11.600.000 | 2 | 12.528.000 | 2 | 13.404.960 | 2 | 14.343.307 | | |
| 5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah | | | | 92.850.000 | | 69.600.000 | | 75.168.000 | | 80.429.760 | | 86.059.842 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 92.850.000 | 1 | 69.600.000 | 1 | 75.168.000 | 1 | 80.429.760 | 1 | 86.059.842 | | |
| | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 5.02.01.1.03.0001 – Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | 5.800.000 | | 6.264.000 | | 6.702.480 | | 7.171.653 | | |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.800.000 | 2 | 6.264.000 | 2 | 6.702.480 | 2 | 7.171.653 | | |
| 5.02.01.1.03.0005 – Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 82.850.000 | | 58.000.000 | | 62.640.000 | | 67.024.800 | | 71.716.536 | | |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 82.850.000 | 1 | 58.000.000 | 1 | 62.640.000 | 1 | 67.024.800 | 1 | 71.716.536 | | |
| 5.02.01.1.03.0006 – Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5.000.000 | | 5.800.000 | | 6.264.000 | | 6.702.480 | | 7.171.653 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.800.000 | 1 | 6.264.000 | 1 | 6.702.480 | 1 | 7.171.653 | | |
| 5.02.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 5.02.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.02.01.1.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.02.01.1.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.02.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 261.265.500 | | 221.032.814 | | 175.818.114 | | 246.363.645 | | 201.294.156 | | |
| Tersedianya ASN yang berkompeten | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 1 | 1 | 261.265.500 | 1 | 221.032.814 | 1 | 175.818.114 | 1 | 246.363.645 | 1 | 201.294.156 | | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | - | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | - | 1 | | 1 | | - | | 1 | | - | | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 50.205.400 | | 58.238.264 | | 0 | | 58.238.264 | | 0 | | |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | - | 1 | 50.205.400 | 1 | 58.238.264 | - | 0 | 1 | 58.238.264 | - | 0 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|--|
| 5.02.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi | | | | 115.461.350 | | 56.260.000 | | 60.760.800 | | 65.014.056 | | 69.565.039 | | |
| Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | 1 | 115.461.350 | 1 | 56.260.000 | 1 | 60.760.800 | 1 | 65.014.056 | 1 | 69.565.039 | | |
| 5.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | | | | 8.100.000 | | 19.396.000 | | 20.947.680 | | 22.414.017 | | 23.982.998 | | |
| Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 1 | 1 | 8.100.000 | 1 | 19.396.000 | 1 | 20.947.680 | 1 | 22.414.017 | 1 | 23.982.998 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 71.000.000 | | 58.000.000 | | 62.640.000 | | 67.024.800 | | 71.716.536 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | 3 | 71.000.000 | 3 | 58.000.000 | 3 | 62.640.000 | 3 | 67.024.800 | 3 | 71.716.536 | | |
| 5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 13.538.750 | | 15.704.950 | | 16.961.346 | | 18.148.640 | | 19.419.045 | | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 50 | 50 | 13.538.750 | 50 | 15.704.950 | 50 | 16.961.346 | 50 | 18.148.640 | 50 | 19.419.045 | | |
| 5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 2.960.000 | | 13.433.600 | | 14.508.288 | | 15.523.868 | | 16.610.538 | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | - | 5 | 2.960.000 | 5 | 13.433.600 | 5 | 14.508.288 | 5 | 15.523.868 | 5 | 16.610.538 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 267.223.356 | | 184.117.431 | | 368.846.826 | | 394.666.103 | | 504.723.424 | | |
| Tersedianya laporan pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan pendapatan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 267.223.356 | 4 | 184.117.431 | 4 | 368.846.826 | 4 | 394.666.103 | 4 | 504.723.424 | | |
| | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|---|------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|--|
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 47.119.191 | | 11.600.000 | | 12.528.000 | | 13.404.960 | | 14.343.307 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 47.119.191 | 1 | 11.600.000 | 1 | 12.528.000 | 1 | 13.404.960 | 1 | 14.343.307 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.124.165 | | 58.000.000 | | 62.640.000 | | 67.024.800 | | 71.716.536 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 2 | 100.124.165 | 2 | 58.000.000 | 2 | 62.640.000 | 2 | 67.024.800 | 2 | 71.716.536 | | |
| 5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.800.000 | | 33.340.631 | | 106.007.882 | | 113.428.433 | | 121.368.424 | | |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | 8 | 10.800.000 | 8 | 33.340.631 | 8 | 106.007.882 | 8 | 113.428.433 | 8 | 121.368.424 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 89.200.000 | | 58.000.000 | | 62.640.000 | | 67.024.800 | | 154.147.229 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 89.200.000 | 4 | 58.000.000 | 4 | 62.640.000 | 4 | 67.024.800 | 4 | 154.147.229 | | |
| 5.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 9.990.000 | | 11.588.400 | | 12.515.472 | | 13.391.555 | | 14.328.964 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 0 | 1 | 9.990.000 | 1 | 11.588.400 | 1 | 12.515.472 | 1 | 13.391.555 | 1 | 14.328.964 | | |
| 5.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 9.990.000 | | 11.588.400 | | 112.515.472 | | 120.391.555 | | 128.818.964 | | |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 9.990.000 | 1 | 11.588.400 | 1 | 112.515.472 | 1 | 120.391.555 | 1 | 128.818.964 | | |
| 5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1.002.432.704 | | 628.720.001 | | 397.446.197 | | 425.267.434 | | 455.036.156 | | |
| Tersedianya laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 1.002.432.704 | 0 | 628.720.001 | 0 | 397.446.197 | 0 | 425.267.434 | 0 | 455.036.156 | | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 9 | 10 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 660.000.000 | | 359.600.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 1 | 660.000.000 | 1 | 359.600.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 5.02.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 342.432.704 | | 269.120.001 | | 397.446.197 | | 425.267.434 | | 455.036.156 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 9 | 10 | 342.432.704 | 8 | 269.120.001 | 8 | 397.446.197 | 8 | 425.267.434 | 8 | 455.036.156 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 4.911.842.771 | | 4.849.268.275 | | 4.967.107.324 | | 5.088.481.543 | | 5.213.496.990 | | |
| Tersedianya laporan pelaksanaan pelayanan kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 4.911.842.771 | 12 | 4.849.268.275 | 12 | 4.967.107.324 | 12 | 5.088.481.543 | 12 | 5.213.496.990 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 3.990.542.771 | | 3.927.968.275 | | 4.045.807.324 | | 4.167.181.543 | | 4.292.196.990 | | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 3.990.542.771 | 12 | 3.927.968.275 | 12 | 4.045.807.324 | 12 | 4.167.181.543 | 12 | 4.292.196.990 | | | |
| 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 921.300.000 | | 921.300.000 | | 921.300.000 | | 921.300.000 | | 921.300.000 | | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 921.300.000 | 1 | 921.300.000 | 1 | 921.300.000 | 1 | 921.300.000 | 1 | 921.300.000 | | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.790.149.641,14 | | 622.920.000 | | 772.753.600 | | 772.918.015 | | 796.105.556 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|--|
| Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 1.790.149.641,14 | 2 | 622.920.000 | 2 | 772.753.600 | 2 | 772.918.015 | 2 | 796.105.556 | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 148.032.991,14 | | 136.880.000 | | 147.830.400 | | 147.830.400 | | 152.265.312 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | 1 | 148.032.991,14 | 1 | 136.880.000 | 1 | 147.830.400 | 1 | 147.830.400 | 1 | 152.265.312 | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 249.500.000 | | 138.040.000 | | 149.083.200 | | 149.083.200 | | 153.555.696 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | | 249.500.000 | | 138.040.000 | | 149.083.200 | | 149.083.200 | | 153.555.696 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 289.727.500 | | 116.000.000 | | 125.280.000 | | 125.280.000 | | 129.038.400 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4 | 4 | 289.727.500 | 4 | 116.000.000 | 4 | 125.280.000 | 4 | 125.280.000 | 4 | 129.038.400 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 902.889.150 | | 116.000.000 | | 125.280.000 | | 125.280.000 | | 129.038.400 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 902.889.150 | 2 | 116.000.000 | 2 | 125.280.000 | 2 | 125.280.000 | 2 | 129.038.400 | | |
| 5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | 116.000.000 | | 225.280.000 | | 225.444.415 | | 232.207.748 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 2 | 200.000.000 | 2 | 116.000.000 | 2 | 225.280.000 | 2 | 225.444.415 | 2 | 232.207.748 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86 | 86,15 | 6.650.187.616 | 86,2 | 5.757.125.763 | 86,25 | 6.008.891.727 | 86,43 | 6.264.936.196 | 86,58 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 01 - UPT Wil. I Palu | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 9.000.000 | | 14.130.000 | | 14.586.981 | | 14.445.561 | | 8.599.554 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 9.000.000 | 12 | 14.130.000 | 12 | 14.586.981 | 12 | 14.445.561 | 12 | 8.599.554 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 9.000.000 | | 14.130.000 | | 14.586.981 | | 14.445.561 | | 8.599.554 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 9.000.000 | 12 | 14.130.000 | 12 | 14.586.981 | 12 | 14.445.561 | 12 | 8.599.554 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 29.798.665 | | 31.783.904 | | 33.373.099 | | 33.706.830 | | 35.055.103 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 29.798.665 | 1 | 31.783.904 | 1 | 33.373.099 | 1 | 33.706.830 | 1 | 35.055.103 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | 11.400.000 | | 11.970.000 | | 12.089.700 | | 12.573.288 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 11.400.000 | 1 | 11.970.000 | 1 | 12.089.700 | 1 | 12.573.288 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.798.665 | | 20.383.904 | | 21.403.099 | | 21.617.130 | | 22.481.815 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 9.798.665 | 2 | 20.383.904 | 2 | 21.403.099 | 2 | 21.617.130 | 2 | 22.481.815 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.094.283.255 | | 877.887.615 | | 916.041.766 | | 958.011.333 | | 1.004.177.855 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 1.094.283.255 | 12 | 877.887.615 | 12 | 916.041.766 | 12 | 958.011.333 | 12 | 1.004.177.855 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 446.883.255 | | 381.541.512 | | 419.695.663 | | 461.665.230 | | 507.831.752 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 446.883.255 | 12 | 381.541.512 | 12 | 419.695.663 | 12 | 461.665.230 | 12 | 507.831.752 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 647.400.000 | | 496.346.103 | | 496.346.103 | | 496.346.103 | | 496.346.103 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 647.400.000 | 12 | 496.346.103 | 12 | 496.346.103 | 12 | 496.346.103 | 12 | 496.346.103 | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 10.500.000 | | 31.682.668 | | 33.266.801 | | 33.599.469 | | 34.943.448 | | |
| Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8 | 8 | 10.500.000 | 8 | 31.682.668 | 8 | 33.266.801 | 8 | 33.599.469 | 8 | 34.943.448 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 3.000.000 | | 19.907.668 | | 20.903.051 | | 21.112.082 | | 21.956.565 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8 | 8 | 3.000.000 | 8 | 19.907.668 | 8 | 20.903.051 | 8 | 21.112.082 | 8 | 21.956.565 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 7.500.000 | | 11.775.000 | | 12.363.750 | | 12.487.387 | | 12.986.883 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 7.500.000 | 2 | 11.775.000 | 2 | 12.363.750 | 2 | 12.487.387 | 2 | 12.986.883 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 82,5 | 82,65 | 6.650.187.616 | 82,7 | 5.757.125.763 | 82,75 | 6.008.891.727 | 82,93 | 6.264.936.196 | 83,08 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 34.437.101 | | 20.645.054 | | 23.593.823 | | 26.604.299 | | 29.263.554 | 02 - UPT Wil. II Parigi Moutong | |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 34.437.101 | 1 | 20.645.054 | 1 | 23.593.823 | 1 | 26.604.299 | 1 | 29.263.554 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 34.437.101 | | 20.645.054 | | 23.593.823 | | 26.604.299 | | 29.263.554 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 34.437.101 | 1 | 20.645.054 | 1 | 23.593.823 | 1 | 26.604.299 | 1 | 29.263.554 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 55.068.160 | | 16.341.217 | | 18.792.400 | | 21.047.488 | | 23.152.237 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 55.068.160 | 1 | 16.341.217 | 1 | 18.792.400 | 1 | 21.047.488 | 1 | 23.152.237 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--|--|
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.265.000 | | 2.041.217 | | 2.347.400 | | 2.629.088 | | 2.891.997 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1.265.000 | 1 | 2.041.217 | 1 | 2.347.400 | 1 | 2.629.088 | 1 | 2.891.997 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 53.803.160 | | 14.300.000 | | 16.445.000 | | 18.418.400 | | 20.260.240 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 53.803.160 | 2 | 14.300.000 | 2 | 16.445.000 | 2 | 18.418.400 | 2 | 20.260.240 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 534.720.000 | | 471.024.252 | | 482.521.452 | | 495.168.372 | | 509.079.984 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 534.720.000 | 12 | 471.024.252 | 12 | 482.521.452 | 12 | 495.168.372 | 12 | 509.079.984 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 143.520.000 | | 114.972.000 | | 126.469.200 | | 139.116.120 | | 153.027.732 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 143.520.000 | 12 | 114.972.000 | 12 | 126.469.200 | 12 | 139.116.120 | 12 | 153.027.732 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 391.200.000 | | 356.052.252 | | 356.052.252 | | 356.052.252 | | 356.052.252 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 391.200.000 | 12 | 356.052.252 | 12 | 356.052.252 | 12 | 356.052.252 | 12 | 356.052.252 | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 96.100.000 | | 50.050.000 | | 57.557.500 | | 64.464.400 | | 70.910.840 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 96.100.000 | 2 | 50.050.000 | 2 | 57.557.500 | 2 | 64.464.400 | 2 | 70.910.840 | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 29.400.000 | | 28.600.000 | | 32.890.000 | | 36.836.800 | | 40.520.480 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3 | 3 | 29.400.000 | 3 | 28.600.000 | 3 | 32.890.000 | 3 | 36.836.800 | 3 | 40.520.480 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 66.700.000 | | 21.450.000 | | 24.667.500 | | 27.627.600 | | 30.390.360 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 66.700.000 | 2 | 21.450.000 | 2 | 24.667.500 | 2 | 27.627.600 | 2 | 30.390.360 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 87,4 | 87,55 | 6.650.187.616 | 87,6 | 5.757.125.763 | 87,65 | 6.008.891.727 | 87,83 | 6.264.936.196 | 87,98 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 03 - UPT Wil. III Poso | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 45.000.000 | | 34.355.182 | | 36.179.831 | | 37.712.905 | | 38.448.000 | | |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 45.000.000 | 12 | 34.355.182 | 12 | 36.179.831 | 12 | 37.712.905 | 12 | 38.448.000 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 45.000.000 | | 34.355.182 | | 36.179.831 | | 37.712.905 | | 38.448.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 45.000.000 | 12 | 34.355.182 | 12 | 36.179.831 | 12 | 37.712.905 | 12 | 38.448.000 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 66.478.935 | | 36.722.410 | | 38.191.306 | | 39.337.046 | | 40.123.787 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 66.478.935 | 1 | 36.722.410 | 1 | 38.191.306 | 1 | 39.337.046 | 1 | 40.123.787 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.657.250 | | 1.922.410 | | 1.999.306 | | 2.059.286 | | 2.100.471 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1.657.250 | 1 | 1.922.410 | 1 | 1.999.306 | 1 | 2.059.286 | 1 | 2.100.471 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 64.821.685 | | 34.800.000 | | 36.192.000 | | 37.277.760 | | 38.023.316 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 64.821.685 | 2 | 34.800.000 | 2 | 36.192.000 | 2 | 37.277.760 | 2 | 38.023.316 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 313.940.000 | | 291.569.144 | | 304.286.059 | | 318.274.664 | | 333.662.131 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 313.940.000 | 12 | 291.569.144 | 12 | 304.286.059 | 12 | 318.274.664 | 12 | 333.662.131 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 149.540.000 | | 127.169.144 | | 139.886.059 | | 153.874.664 | | 169.262.131 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 149.540.000 | 12 | 127.169.144 | 12 | 139.886.059 | 12 | 153.874.664 | 12 | 169.262.131 | | |
| 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 164.400.000 | | 164.400.000 | | 164.400.000 | | 164.400.000 | | 164.400.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 164.400.000 | 12 | 164.400.000 | 12 | 164.400.000 | 12 | 164.400.000 | 12 | 164.400.000 | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 57.820.000 | | 40.600.000 | | 42.224.000 | | 43.490.720 | | 44.715.101 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 57.820.000 | 2 | 40.600.000 | 2 | 42.224.000 | 2 | 43.490.720 | 2 | 44.715.101 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 34.420.000 | | 23.200.000 | | 24.128.000 | | 24.851.840 | | 25.348.877 | | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6 | 6 | 34.420.000 | 6 | 23.200.000 | 6 | 24.128.000 | 6 | 24.851.840 | 6 | 25.348.877 | | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 23.400.000 | | 17.400.000 | | 18.096.000 | | 18.638.880 | | 19.366.224 | | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 23.400.000 | 2 | 17.400.000 | 2 | 18.096.000 | 2 | 18.638.880 | 2 | 19.366.224 | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 88,1 | 88,25 | 6.650.187.616 | 88,3 | 5.757.125.763 | 88,35 | 6.008.891.727 | 88,53 | 6.264.936.196 | 88,68 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 | | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 101.538.000 | | 67.143.671 | | 69.157.981 | | 70.855.851 | | 72.272.968 | 04 - UPT Wil. IV Morowali | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 101.538.000 | 1 | 67.143.671 | 1 | 69.157.981 | 1 | 70.855.851 | 1 | 72.272.968 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 101.538.000 | | 67.143.671 | | 69.157.981 | | 70.855.851 | | 72.272.968 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 101.538.000 | 1 | 67.143.671 | 1 | 69.157.981 | 1 | 70.855.851 | 1 | 72.272.968 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 15.454.681 | | 17.154.695 | | 17.669.336 | | 18.199.416 | | 18.563.404 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 15.454.681 | 1 | 17.154.695 | 1 | 17.669.336 | 1 | 18.199.416 | 1 | 18.563.404 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.272.296 | | 5.852.248 | | 6.027.816 | | 6.208.650 | | 6.332.823 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 5.272.296 | 1 | 5.852.248 | 1 | 6.027.816 | 1 | 6.208.650 | 1 | 6.332.823 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.182.385 | | 11.302.447 | | 11.641.520 | | 11.990.766 | | 12.230.581 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 10.182.385 | 2 | 11.302.447 | 2 | 11.641.520 | 2 | 11.990.766 | 2 | 12.230.581 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 192.726.250 | | 201.918.875 | | 212.030.763 | | 223.153.839 | | 235.389.223 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 192.726.250 | 12 | 201.918.875 | 12 | 212.030.763 | 12 | 223.153.839 | 12 | 235.389.223 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGLATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 91.926.250 | | 101.118.875 | | 111.230.763 | | 122.353.839 | | 134.589.223 | | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 91.926.250 | 12 | 101.118.875 | 12 | 111.230.763 | 12 | 122.353.839 | 12 | 134.589.223 | | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 100.800.000 | | 100.800.000 | | 100.800.000 | | 100.800.000 | | 100.800.000 | | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 100.800.000 | 12 | 100.800.000 | 12 | 100.800.000 | 12 | 100.800.000 | 12 | 100.800.000 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 46.297.000 | | 46.949.670 | | 48.878.617 | | 50.344.975 | | 51.326.568 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 46.297.000 | 2 | 46.949.670 | 2 | 48.878.617 | 2 | 50.344.975 | 2 | 51.326.568 | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 16.300.000 | | 18.093.000 | | 18.635.790 | | 19.194.863 | | 19.578.760 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | 5 | 16.300.000 | 5 | 18.093.000 | 5 | 18.635.790 | 5 | 19.194.863 | 5 | 19.578.760 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 29.997.000 | | 28.856.670 | | 30.242.827 | | 31.150.112 | | 31.747.808 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 29.997.000 | 2 | 28.856.670 | 2 | 30.242.827 | 2 | 31.150.112 | 2 | 31.747.808 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 88,1 | 88,25 | 6.650.187.616 | 88,3 | 5.757.125.763 | 88,35 | 6.008.891.727 | 88,53 | 6.264.936.196 | 88,68 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 05 - UPT Wil. V Banggai | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 65.503.000 | | 66.255.361 | | 73.983.282 | | 81.370.038 | | 87.879.641 | | |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 65.503.000 | 12 | 66.255.361 | 12 | 73.983.282 | 12 | 81.370.038 | 12 | 87.879.641 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 65.503.000 | | 66.255.361 | | 73.983.282 | | 81.370.038 | | 87.879.641 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 65.503.000 | 12 | 66.255.361 | 12 | 73.983.282 | 12 | 81.370.038 | 12 | 87.879.641 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 36.060.995 | | 15.065.000 | | 16.872.800 | | 18.560.080 | | 20.044.886 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 36.060.995 | 1 | 15.065.000 | 1 | 16.872.800 | 1 | 18.560.080 | 1 | 20.044.886 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.500.000 | | 1.965.000 | | 2.200.800 | | 2.420.880 | | 2.614.550 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.965.000 | 1 | 2.200.800 | 1 | 2.420.880 | 1 | 2.614.550 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 34.560.995 | | 13.100.000 | | 14.672.000 | | 16.139.200 | | 17.430.336 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 34.560.995 | 2 | 13.100.000 | 2 | 14.672.000 | 2 | 16.139.200 | 2 | 17.430.336 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 518.141.800 | | 438.532.577 | | 449.532.577 | | 461.632.577 | | 474.942.576 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 518.141.800 | 12 | 438.532.577 | 12 | 449.532.577 | 12 | 461.632.577 | 12 | 474.942.576 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 104.641.800 | | 110.000.000 | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.409.999 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 104.641.800 | 12 | 110.000.000 | 12 | 121.000.000 | 12 | 133.100.000 | 12 | 146.409.999 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 413.500.000 | | 328.532.577 | | 328.532.577 | | 328.532.577 | | 328.532.577 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 413.500.000 | 12 | 328.532.577 | 12 | 328.532.577 | 12 | 328.532.577 | 12 | 328.532.577 | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 22.000.000 | | 28.820.000 | | 32.278.400 | | 35.506.240 | | 38.901.287 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 22.000.000 | 2 | 28.820.000 | 2 | 32.278.400 | 2 | 35.506.240 | 2 | 38.901.287 | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 7.000.000 | | 9.170.000 | | 10.270.400 | | 11.297.440 | | 12.201.235 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 9 | 9 | 7.000.000 | 9 | 9.170.000 | 9 | 10.270.400 | 9 | 11.297.440 | 9 | 12.201.235 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 15.000.000 | | 19.650.000 | | 22.008.000 | | 24.208.800 | | 26.700.052 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 19.650.000 | 2 | 22.008.000 | 2 | 24.208.800 | 2 | 26.700.052 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 84,7 | 84,85 | 6.650.187.616 | 84,9 | 5.757.125.763 | 84,95 | 6.008.891.727 | 85,13 | 6.264.936.196 | 85,28 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 06 - UPT Wil. VI Banggai Kepulauan | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 102.852.000 | | 79.609.349 | | 82.120.188 | | 84.597.718 | | 86.289.673 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 102.852.000 | 1 | 79.609.349 | 1 | 82.120.188 | 1 | 84.597.718 | 1 | 86.289.673 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 102.852.000 | | 79.609.349 | | 82.120.188 | | 84.597.718 | | 86.289.673 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 102.852.000 | 1 | 79.609.349 | 1 | 82.120.188 | 1 | 84.597.718 | 1 | 86.289.673 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 32.700.963 | | 28.923.835 | | 30.080.788 | | 30.983.213 | | 31.602.876 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 32.700.963 | 1 | 28.923.835 | 1 | 30.080.788 | 1 | 30.983.213 | 1 | 31.602.876 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 708.399 | | 779.239 | | 810.408 | | 834.721 | | 851.415 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 708.399 | 1 | 779.239 | 1 | 810.408 | 1 | 834.721 | 1 | 851.415 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 31.992.564 | | 28.144.596 | | 29.270.380 | | 30.148.492 | | 30.751.461 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 31.992.564 | 1 | 28.144.596 | 1 | 29.270.380 | 1 | 30.148.492 | 1 | 30.751.461 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 155.524.405 | | 161.199.935 | | 169.459.928 | | 178.545.921 | | 188.540.513 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 155.524.405 | 12 | 161.199.935 | 12 | 169.459.928 | 12 | 178.545.921 | 12 | 188.540.513 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 76.924.405 | | 82.599.935 | | 90.859.928 | | 99.945.921 | | 109.940.513 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 76.924.405 | 12 | 82.599.935 | 12 | 90.859.928 | 12 | 99.945.921 | 12 | 109.940.513 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 78.600.000 | | 78.600.000 | | 78.600.000 | | 78.600.000 | | 78.600.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 78.600.000 | 12 | 78.600.000 | 12 | 78.600.000 | 12 | 78.600.000 | 12 | 78.600.000 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|--|
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 32.170.000 | | 35.387.000 | | 36.802.480 | | 37.906.554 | | 39.335.850 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 3 | 3 | 32.170.000 | 3 | 35.387.000 | 3 | 36.802.480 | 3 | 37.906.554 | 3 | 39.335.850 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 26.200.000 | | 28.820.000 | | 29.972.800 | | 30.871.984 | | 31.489.423 | | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3 | 3 | 26.200.000 | 3 | 28.820.000 | 3 | 29.972.800 | 3 | 30.871.984 | 3 | 31.489.423 | | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.970.000 | | 6.567.000 | | 6.829.680 | | 7.034.570 | | 7.846.427 | | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 3 | 3 | 5.970.000 | 3 | 6.567.000 | 3 | 6.829.680 | 3 | 7.034.570 | 3 | 7.846.427 | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 84,7 | 84,85 | 6.650.187.616 | 84,9 | 5.757.125.763 | 84,95 | 6.008.891.727 | 85,13 | 6.264.936.196 | 85,28 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 07 - UPT Wil. VII Toli-Toli | | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 68.945.000 | | 22.121.670 | | 19.813.316 | | 17.709.582 | | 9.418.299 | | | |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 68.945.000 | 12 | 22.121.670 | 12 | 19.813.316 | 12 | 17.709.582 | 12 | 9.418.299 | | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 68.945.000 | | 22.121.670 | | 19.813.316 | | 17.709.582 | | 9.418.299 | | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 68.945.000 | 12 | 22.121.670 | 12 | 19.813.316 | 12 | 17.709.582 | 12 | 9.418.299 | | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 37.223.690 | | 27.513.714 | | 27.788.850 | | 26.844.627 | | 27.918.413 | | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 37.223.690 | 1 | 27.513.714 | 1 | 27.788.850 | 1 | 26.844.627 | 1 | 27.918.413 | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.868.300 | | 5.209.081 | | 5.261.171 | | 5.366.395 | | 5.581.051 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 4.868.300 | 1 | 5.209.081 | 1 | 5.261.171 | 1 | 5.366.395 | 1 | 5.581.051 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 32.355.390 | | 22.304.633 | | 22.527.679 | | 21.478.232 | | 22.337.362 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 32.355.390 | 2 | 22.304.633 | 2 | 22.527.679 | 2 | 21.478.232 | 2 | 22.337.362 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 152.590.832 | | 218.419.574 | | 234.621.532 | | 252.443.685 | | 272.048.053 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 152.590.832 | 12 | 218.419.574 | 12 | 234.621.532 | 12 | 252.443.685 | 12 | 272.048.053 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 96.190.832 | | 162.019.574 | | 178.221.532 | | 196.043.685 | | 215.648.053 | | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 96.190.832 | 12 | 162.019.574 | 12 | 178.221.532 | 12 | 196.043.685 | 12 | 215.648.053 | | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 56.400.000 | | 56.400.000 | | 56.400.000 | | 56.400.000 | | 56.400.000 | | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 56.400.000 | 12 | 56.400.000 | 12 | 56.400.000 | 12 | 56.400.000 | 12 | 56.400.000 | | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 103.781.000 | | 72.525.670 | | 73.250.926 | | 73.623.834 | | 76.568.787 | | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8 | 8 | 103.781.000 | 8 | 72.525.670 | 8 | 73.250.926 | 8 | 73.623.834 | 8 | 76.568.787 | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 27.100.000 | | 28.997.000 | | 29.286.970 | | 29.872.709 | | 31.067.617 | | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8 | 8 | 27.100.000 | 8 | 28.997.000 | 8 | 29.286.970 | 8 | 29.872.709 | 8 | 31.067.617 | | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 76.681.000 | | 43.528.670 | | 43.963.956 | | 43.751.125 | | 45.501.170 | | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 2 | 76.681.000 | 2 | 43.528.670 | 2 | 43.963.956 | 2 | 43.751.125 | 2 | 45.501.170 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 88,3 | 88,45 | 6.650.187.616 | 88,5 | 5.757.125.763 | 88,55 | 6.008.891.727 | 88,73 | 6.264.936.196 | 88,88 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 08 - UPT Wil. VIII Buol |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 148.464.000 | | 44.543.362 | | 47.513.888 | | 50.505.455 | | 53.535.782 | |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 148.464.000 | 12 | 44.543.362 | 12 | 47.513.888 | 12 | 50.505.455 | 12 | 53.535.782 | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 148.464.000 | | 44.543.362 | | 47.513.888 | | 50.505.455 | | 53.535.782 | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 148.464.000 | 12 | 44.543.362 | 12 | 47.513.888 | 12 | 50.505.455 | 12 | 53.535.782 | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 27.468.400 | | 27.458.028 | | 29.654.670 | | 31.730.497 | | 33.634.327 | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 27.468.400 | 1 | 27.458.028 | 1 | 29.654.670 | 1 | 31.730.497 | 1 | 33.634.327 | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | 3.510.000 | | 3.790.800 | | 4.056.156 | | 4.299.525 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.510.000 | 1 | 3.790.800 | 1 | 4.056.156 | 1 | 4.299.525 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 24.468.400 | | 23.948.028 | | 25.863.870 | | 27.674.341 | | 29.334.802 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 24.468.400 | 1 | 23.948.028 | 1 | 25.863.870 | 1 | 27.674.341 | 1 | 29.334.802 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 225.801.750 | | 231.341.925 | | 237.436.117 | | 244.139.729 | | 251.513.702 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 225.801.750 | 12 | 231.341.925 | 12 | 237.436.117 | 12 | 244.139.729 | 12 | 251.513.702 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 55.401.750 | | 60.941.925 | | 67.036.117 | | 73.739.729 | | 81.113.702 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 55.401.750 | 12 | 60.941.925 | 12 | 67.036.117 | 12 | 73.739.729 | 12 | 81.113.702 | | |
| 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 170.400.000 | | 170.400.000 | | 170.400.000 | | 170.400.000 | | 170.400.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 170.400.000 | 12 | 170.400.000 | 12 | 170.400.000 | 12 | 170.400.000 | 12 | 170.400.000 | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 55.160.000 | | 55.259.708 | | 59.680.485 | | 63.858.119 | | 67.693.122 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | 1 | 55.160.000 | 1 | 55.259.708 | 1 | 59.680.485 | 1 | 63.858.119 | 1 | 67.693.122 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 27.800.000 | | 31.859.708 | | 34.408.485 | | 36.817.079 | | 39.026.104 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | 1 | 27.800.000 | 1 | 31.859.708 | 1 | 34.408.485 | 1 | 36.817.079 | 1 | 39.026.104 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 27.360.000 | | 23.400.000 | | 25.272.000 | | 27.041.040 | | 28.667.018 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 27.360.000 | 1 | 23.400.000 | 1 | 25.272.000 | 1 | 27.041.040 | 1 | 28.667.018 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 85,2 | 85,35 | 6.650.187.616 | 85,4 | 5.757.125.763 | 85,45 | 6.008.891.727 | 85,63 | 6.264.936.196 | 85,78 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 59.451.000 | | 54.608.647 | | 56.145.005 | | 57.267.905 | | 57.840.584 | | |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 59.451.000 | 12 | 54.608.647 | 12 | 56.145.005 | 12 | 57.267.905 | 12 | 57.840.584 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 59.451.000 | | 54.608.647 | | 56.145.005 | | 57.267.905 | | 57.840.584 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 59.451.000 | 12 | 54.608.647 | 12 | 56.145.005 | 12 | 57.267.905 | 12 | 57.840.584 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 40.799.000 | | 33.878.900 | | 34.895.267 | | 35.593.173 | | 35.949.104 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 40.799.000 | 1 | 33.878.900 | 1 | 34.895.267 | 1 | 35.593.173 | 1 | 35.949.104 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.109.256 | | 2.320.182 | | 2.389.787 | | 2.437.583 | | 2.461.959 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 2.109.256 | 1 | 2.320.182 | 1 | 2.389.787 | 1 | 2.437.583 | 1 | 2.461.959 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 38.689.744 | | 31.558.718 | | 32.505.480 | | 33.155.590 | | 33.487.145 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 38.689.744 | 1 | 31.558.718 | 1 | 32.505.480 | 1 | 33.155.590 | 1 | 33.487.145 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 193.902.774 | | 203.718.151 | | 214.513.966 | | 226.389.363 | | 239.452.299 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 0 | 193.902.774 | 0 | 203.718.151 | 0 | 214.513.966 | 0 | 226.389.363 | 0 | 239.452.299 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 98.142.774 | | 107.958.151 | | 118.753.966 | | 130.629.363 | | 143.692.299 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 98.142.774 | 12 | 107.958.151 | 12 | 118.753.966 | 12 | 130.629.363 | 12 | 143.692.299 | | |
| 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 95.760.000 | | 95.760.000 | | 95.760.000 | | 95.760.000 | | 95.760.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 95.760.000 | 12 | 95.760.000 | 12 | 95.760.000 | 12 | 95.760.000 | 12 | 95.760.000 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 55.740.000 | | 41.514.000 | | 42.759.420 | | 43.905.186 | | 44.936.607 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | 1 | 55.740.000 | 1 | 41.514.000 | 1 | 42.759.420 | 1 | 43.905.186 | 1 | 44.936.607 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 17.700.000 | | 19.470.000 | | 20.054.100 | | 20.455.182 | | 20.659.734 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | 1 | 17.700.000 | 1 | 19.470.000 | 1 | 20.054.100 | 1 | 20.455.182 | 1 | 20.659.734 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 38.040.000 | | 22.044.000 | | 22.705.320 | | 23.450.004 | | 24.276.873 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 38.040.000 | 1 | 22.044.000 | 1 | 22.705.320 | 1 | 23.450.004 | 1 | 24.276.873 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 84,2 | 84,35 | 6.650.187.616 | 84,4 | 5.757.125.763 | 84,45 | 6.008.891.727 | 84,63 | 6.264.936.196 | 84,78 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 10 - UPT Wil. X Donggala | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 27.750.000 | | 24.502.688 | | 26.501.174 | | 28.356.256 | | 30.573.502 | | |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | 12 | 27.750.000 | 12 | 24.502.688 | 12 | 26.501.174 | 12 | 28.356.256 | 12 | 30.573.502 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 27.750.000 | | 24.502.688 | | 26.501.174 | | 28.356.256 | | 30.573.502 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | 12 | 27.750.000 | 12 | 24.502.688 | 12 | 26.501.174 | 12 | 28.356.256 | 12 | 30.573.502 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 59.634.660 | | 40.868.899 | | 44.138.410 | | 47.228.099 | | 50.061.786 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 59.634.660 | 1 | 40.868.899 | 1 | 44.138.410 | 1 | 47.228.099 | 1 | 50.061.786 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.933.500 | | 5.821.530 | | 6.287.252 | | 6.727.360 | | 7.131.002 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 4.933.500 | 1 | 5.821.530 | 1 | 6.287.252 | 1 | 6.727.360 | 1 | 7.131.002 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 54.701.160 | | 35.047.369 | | 37.851.158 | | 40.500.739 | | 42.930.784 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 54.701.160 | 1 | 35.047.369 | 1 | 37.851.158 | 1 | 40.500.739 | 1 | 42.930.784 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 341.588.500 | | 291.373.975 | | 298.911.373 | | 307.202.509 | | 316.322.761 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 341.588.500 | 12 | 291.373.975 | 12 | 298.911.373 | 12 | 307.202.509 | 12 | 316.322.761 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 125.588.500 | | 75.373.975 | | 82.911.373 | | 91.202.509 | | 100.322.761 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 125.588.500 | 12 | 75.373.975 | 12 | 82.911.373 | 12 | 91.202.509 | 12 | 100.322.761 | | |
| 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 216.000.000 | 12 | 216.000.000 | 12 | 216.000.000 | 12 | 216.000.000 | 12 | 216.000.000 | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 85.320.000 | | 77.077.600 | | 83.243.808 | | 89.301.906 | | 94.660.021 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | 1 | 85.320.000 | 1 | 77.077.600 | 1 | 83.243.808 | 1 | 89.301.906 | 1 | 94.660.021 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 28.250.000 | | 33.335.000 | | 36.001.800 | | 38.521.926 | | 40.833.242 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | 1 | 28.250.000 | 1 | 33.335.000 | 1 | 36.001.800 | 1 | 38.521.926 | 1 | 40.833.242 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57.070.000 | | 43.742.600 | | 47.242.008 | | 50.779.980 | | 53.826.779 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 57.070.000 | 1 | 43.742.600 | 1 | 47.242.008 | 1 | 50.779.980 | 1 | 53.826.779 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 87,1 | 87,25 | 6.650.187.616 | 87,3 | 5.757.125.763 | 87,35 | 6.008.891.727 | 87,53 | 6.264.936.196 | 87,68 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 11 - UPT Wil. XI Sigi | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGLIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 10.360.000 | | 14.617.615 | | 16.368.565 | | 17.841.736 | | 18.821.043 | | |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 10.360.000 | 12 | 14.617.615 | 12 | 16.368.565 | 12 | 17.841.736 | 12 | 18.821.043 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 10.360.000 | | 14.617.615 | | 16.368.565 | | 17.841.736 | | 18.821.043 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 12 | 10.360.000 | 12 | 14.617.615 | 12 | 16.368.565 | 12 | 17.841.736 | 12 | 18.821.043 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 78.360.000 | | 28.096.800 | | 31.187.448 | | 33.994.318 | | 36.373.921 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 78.360.000 | 1 | 28.096.800 | 1 | 31.187.448 | 1 | 33.994.318 | 1 | 36.373.921 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | 6.900.000 | | 7.659.000 | | 8.348.310 | | 8.932.692 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.900.000 | 1 | 7.659.000 | 1 | 8.348.310 | 1 | 8.932.692 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 73.360.000 | | 21.196.800 | | 23.528.448 | | 25.646.008 | | 27.441.229 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 73.360.000 | 1 | 21.196.800 | 1 | 23.528.448 | 1 | 25.646.008 | 1 | 27.441.229 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 607.485.600 | | 522.654.160 | | 539.339.576 | | 557.693.534 | | 577.882.887 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 607.485.600 | 12 | 522.654.160 | 12 | 539.339.576 | 12 | 557.693.534 | 12 | 577.882.887 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 251.685.600 | | 166.854.160 | | 183.539.576 | | 201.893.534 | | 222.082.887 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 251.685.600 | 12 | 166.854.160 | 12 | 183.539.576 | 12 | 201.893.534 | 12 | 222.082.887 | | |
| 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 355.800.000 | | 355.800.000 | | 355.800.000 | | 355.800.000 | | 355.800.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGLATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 355.800.000 | 12 | 355.800.000 | 12 | 355.800.000 | 12 | 355.800.000 | 12 | 355.800.000 | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 49.880.000 | | 48.246.339 | | 53.553.437 | | 58.209.567 | | 62.284.237 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 49.880.000 | 1 | 48.246.339 | 1 | 53.553.437 | 1 | 58.209.567 | 1 | 62.284.237 | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 17.900.000 | | 22.605.939 | | 25.092.593 | | 27.350.926 | | 29.265.491 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | 1 | 17.900.000 | 1 | 22.605.939 | 1 | 25.092.593 | 1 | 27.350.926 | 1 | 29.265.491 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 31.980.000 | | 25.640.400 | | 28.460.844 | | 30.858.641 | | 33.018.746 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 31.980.000 | 1 | 25.640.400 | 1 | 28.460.844 | 1 | 30.858.641 | 1 | 33.018.746 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 86,3 | 86,45 | 6.650.187.616 | 86,5 | 5.757.125.763 | 86,55 | 6.008.891.727 | 86,73 | 6.264.936.196 | 86,88 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 12 - UPT XII. Morowali Utara | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 29.361.000 | | 40.710.973 | | 41.607.973 | | 42.856.213 | | 44.163.158 | | |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | 12 | 29.361.000 | 12 | 40.710.973 | 12 | 41.607.973 | 12 | 42.856.213 | 12 | 44.163.158 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|--|
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 29.361.000 | | 40.710.973 | | 41.607.973 | | 42.856.213 | | 44.163.158 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | 12 | 29.361.000 | 12 | 40.710.973 | 12 | 41.607.973 | 12 | 42.856.213 | 12 | 44.163.158 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 52.146.600 | | 56.318.328 | | 58.571.061 | | 60.328.193 | | 62.138.039 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 52.146.600 | 1 | 56.318.328 | 1 | 58.571.061 | 1 | 60.328.193 | 1 | 62.138.039 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.402.030 | | 1.514.192 | | 1.574.760 | | 1.622.003 | | 1.670.663 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 1.402.030 | 1 | 1.514.192 | 1 | 1.574.760 | 1 | 1.622.003 | 1 | 1.670.663 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.744.570 | | 54.804.136 | | 56.996.301 | | 58.706.190 | | 60.467.376 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 50.744.570 | 1 | 54.804.136 | 1 | 56.996.301 | 1 | 58.706.190 | 1 | 60.467.376 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 80.510.400 | | 85.201.440 | | 90.361.584 | | 96.037.742 | | 102.281.517 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 80.510.400 | 12 | 85.201.440 | 12 | 90.361.584 | 12 | 96.037.742 | 12 | 102.281.517 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 46.910.400 | | 51.601.440 | | 56.761.584 | | 62.437.742 | | 68.681.517 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 46.910.400 | 12 | 51.601.440 | 12 | 56.761.584 | 12 | 62.437.742 | 12 | 68.681.517 | | |
| 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 33.600.000 | | 33.600.000 | | 33.600.000 | | 33.600.000 | | 33.600.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 33.600.000 | 12 | 33.600.000 | 12 | 33.600.000 | 12 | 33.600.000 | 12 | 33.600.000 | | |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 85.000.000 | | 91.314.000 | | 94.966.560 | | 98.450.757 | | 101.404.280 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 1 | 85.000.000 | 1 | 91.314.000 | 1 | 94.966.560 | 1 | 98.450.757 | 1 | 101.404.280 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 8.000.000 | | 8.640.000 | | 8.985.600 | | 9.255.168 | | 9.532.823 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.640.000 | 1 | 8.985.600 | 1 | 9.255.168 | 1 | 9.532.823 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 77.000.000 | | 82.674.000 | | 85.980.960 | | 89.195.589 | | 91.871.457 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 77.000.000 | 1 | 82.674.000 | 1 | 85.980.960 | 1 | 89.195.589 | 1 | 91.871.457 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 87,6 | 87,75 | 6.650.187.616 | 87,8 | 5.757.125.763 | 87,85 | 6.008.891.727 | 88,03 | 6.264.936.196 | 88,18 | 6.524.103.021 | 5.02.0.00.0.00.01.00 13 - UPT XIII. Banggai Laut | |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 71.148.000 | | 56.089.273 | | 58.364.229 | | 60.115.156 | | 61.701.973 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | 12 | 71.148.000 | 12 | 56.089.273 | 12 | 58.364.229 | 12 | 60.115.156 | 12 | 61.701.973 | | |
| 5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 71.148.000 | | 56.089.273 | | 58.364.229 | | 60.115.156 | | 61.701.973 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 | 12 | 71.148.000 | 12 | 56.089.273 | 12 | 58.364.229 | 12 | 60.115.156 | 12 | 61.701.973 | | |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 36.669.600 | | 34.174.750 | | 35.199.993 | | 36.255.992 | | 36.981.113 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 36.669.600 | 1 | 34.174.750 | 1 | 35.199.993 | 1 | 36.255.992 | 1 | 36.981.113 | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.080.824 | | 3.388.906 | | 3.490.574 | | 3.595.291 | | 3.667.197 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 3.080.824 | 1 | 3.388.906 | 1 | 3.490.574 | 1 | 3.595.291 | 1 | 3.667.197 | | |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 33.588.776 | | 30.785.844 | | 31.709.419 | | 32.660.701 | | 33.313.916 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 33.588.776 | 1 | 30.785.844 | 1 | 31.709.419 | 1 | 32.660.701 | 1 | 33.313.916 | | |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 157.710.600 | | 165.422.160 | | 173.904.876 | | 183.235.864 | | 193.499.000 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 157.710.600 | 0 | 165.422.160 | 0 | 173.904.876 | 0 | 183.235.864 | 0 | 193.499.000 | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 77.115.600 | | 84.827.160 | | 93.309.876 | | 102.640.864 | | 112.904.000 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 77.115.600 | 12 | 84.827.160 | 12 | 93.309.876 | 12 | 102.640.864 | 12 | 112.904.000 | | |
| 5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 80.595.000 | | 80.595.000 | | 80.595.000 | | 80.595.000 | | 80.595.000 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 80.595.000 | 12 | 80.595.000 | 12 | 80.595.000 | 12 | 80.595.000 | 12 | 80.595.000 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 39.820.000 | | 43.802.000 | | 45.116.060 | | 46.297.690 | | 47.223.645 | | |
| Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 1 | 39.820.000 | 1 | 43.802.000 | 1 | 45.116.060 | 1 | 46.297.690 | 1 | 47.223.645 | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|---|--|
| 5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 29.100.000 | | 32.010.000 | | 32.970.300 | | 33.959.409 | | 34.638.598 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 1 | 29.100.000 | 1 | 32.010.000 | 1 | 32.970.300 | 1 | 33.959.409 | 1 | 34.638.598 | | |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.720.000 | | 11.792.000 | | 12.145.760 | | 12.338.281 | | 12.585.047 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 1 | 10.720.000 | 1 | 11.792.000 | 1 | 12.145.760 | 1 | 12.338.281 | 1 | 12.585.047 | | |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 3.068.490.150 | | 5.371.691.914,62 | | 6.104.299.940,02 | | 6.980.378.907,66 | | 8.024.717.004,88 | | |
| Meningkatnya Kualitas Penerimaan Pajak Daerah | Laju Pertumbuhan Pajak Daerah (%) | 26,95 | 2,99 | 313.246.740 | 8,4 | 1.131.037.394 | 8,4 | 1.278.224.513 | 8,4 | 1.469.509.836 | 8,4 | 1.688.374.983 | 5.02.0.00.0.00.01.00 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 1.204.367.240 | | 3.084.878.625,5 | | 3.505.604.272,25 | | 4.008.722.764,51 | | 4.608.469.849,63 | | |
| Terpenuhinya pelayanan pajak daerah yang berkualitas | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan) | 1 | | 89.486.740 | 1 | 782.012.594 | 1 | 880.336.242 | 1 | 1.015.917.207 | 1 | 1.166.743.460 | | |
| | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Laporan) | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 5.02.04.1.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 13.246.740 | | 614.437.394 | | 689.300.515 | | 798.136.478 | | 916.295.621 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana) | 1 | 1 | 13.246.740 | 1 | 614.437.394 | 1 | 689.300.515 | 1 | 798.136.478 | 1 | 916.295.621 | | |
| 5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 54.318.000 | | 103.711.140 | | 118.230.699 | | 134.782.997 | | 155.000.447 | | |
| Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Laporan) | 1 | | 54.318.000 | 1 | 103.711.140 | 1 | 118.230.699 | 1 | 134.782.997 | 1 | 155.000.447 | | |
| 5.02.04.1.01.0011 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | 21.922.000 | | 63.864.060 | | 72.805.028 | | 82.997.732 | | 95.447.392 | | |
| Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan) | 1 | | 21.922.000 | 1 | 63.864.060 | 1 | 72.805.028 | 1 | 82.997.732 | 1 | 95.447.392 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak Daerah, Wajib Pajak Daerah serta Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 1 | 1 | 223.760.000 | 1 | 349.024.800 | 1 | 397.888.271 | | 453.592.629 | | 521.631.523 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGLIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|--|--|
| | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan) | 16 | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | | |
| | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen) | 16 | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 65.393.000 | | 117.333.390 | | 133.760.065 | | 152.486.473 | | 175.359.444 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 1 | 1 | 65.393.000 | 1 | 117.333.390 | 1 | 133.760.065 | | 152.486.473 | | 175.359.444 | | |
| 5.02.04.1.01.0007 - Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | 57.164.000 | | 107.211.720 | | 122.221.360 | | 139.332.351 | | 160.232.204 | | |
| Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan) | 16 | 16 | 57.164.000 | 16 | 107.211.720 | 16 | 122.221.360 | 16 | 139.332.351 | 16 | 160.232.204 | | |
| 5.02.04.1.01.0009 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | 101.203.000 | | 124.479.690 | | 141.906.846 | | 161.773.805 | | 186.039.875 | | |
| Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen) | 16 | 16 | 101.203.000 | 16 | 124.479.690 | 16 | 141.906.846 | 16 | 161.773.805 | 16 | 186.039.875 | | |
| Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) | 100 | 100 | 291.120.000 | 100 | 431.877.600 | 100 | 492.340.464 | 100 | 561.268.128 | 100 | 645.458.348 | | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 1.204.367.240 | | 3.084.878.625,5 | | 3.505.604.272,25 | | 4.008.722.764,51 | | 4.608.469.849,63 | | |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD Non Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 191.120.000 | 12 | 271.977.600 | 12 | 310.054.464 | 12 | 353.462.088 | 12 | 406.481.402 | | |
| 5.02.04.1.01.0013 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | 191.120.000 | | 271.977.600 | | 310.054.464 | | 353.462.088 | | 406.481.402 | | |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 191.120.000 | 12 | 271.977.600 | 12 | 310.054.464 | 12 | 353.462.088 | 12 | 406.481.402 | | |
| Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 100.000.000 | 12 | 159.900.000 | 12 | 182.286.000 | 12 | 207.806.040 | 12 | 238.976.946 | | |
| 5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 100.000.000 | | 159.900.000 | | 182.286.000 | | 207.806.040 | | 238.976.946 | | |
| Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 100.000.000 | 12 | 159.900.000 | 12 | 182.286.000 | 12 | 207.806.040 | 12 | 238.976.946 | | |
| Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) | 31,04 | 36,71 | 300.000.750 | 43,63 | 993.063.939 | 45,75 | 1.132.093.652 | 52,46 | 1.290.586.763 | 56,04 | 1.484.174.778 | | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 1.204.367.240 | | 3.084.878.625,5 | | 3.505.604.272,25 | | 4.008.722.764,51 | | 4.608.469.849,63 | | |
| Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 300.000.750 | 12 | 993.063.939 | 12 | 1.132.093.652 | 12 | 1.290.586.763 | 12 | 1.484.174.778 | | |
| | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.04.1.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 149.999.950 | | 799.499.939 | | 911.429.930 | | 1.039.030.120 | | 1.194.884.638 | | |
| Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 149.999.950 | 12 | 799.499.939 | 12 | 911.429.930 | 12 | 1.039.030.120 | 12 | 1.194.884.638 | | |
| 5.02.04.1.01.0014 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | 150.000.800 | | 193.564.000 | | 220.663.722 | | 251.556.643 | | 289.290.140 | | |
| Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 150.000.800 | 12 | 193.564.000 | 12 | 220.663.722 | 12 | 251.556.643 | 12 | 289.290.140 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 01 - UPT Wil. I Palu | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 269.500.000 | | 379.532.083 | | 431.293.794 | | 493.192.361 | | 566.979.125 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 70.000.000 | 12 | 104.550.000 | 12 | 119.187.000 | 12 | 137.390.616 | 12 | 157.999.208 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 70.000.000 | | 104.550.000 | | 119.187.000 | | 137.390.616 | | 157.999.208 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 70.000.000 | 12 | 104.550.000 | 12 | 119.187.000 | 12 | 137.390.616 | 12 | 157.999.208 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 199.500.000 | 12 | 274.982.083 | 12 | 312.106.794 | 12 | 355.801.745 | 12 | 408.979.917 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 10.000.000 | | 36.900.000 | | 42.066.000 | | 47.955.240 | | 55.148.526 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 36.900.000 | 12 | 42.066.000 | 12 | 47.955.240 | 12 | 55.148.526 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 189.500.000 | | 238.082.083 | | 270.040.794 | | 307.846.505 | | 353.831.391 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 189.500.000 | 12 | 238.082.083 | 12 | 270.040.794 | 12 | 307.846.505 | 12 | 353.831.391 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 02 - UPT Wil. II Parigi Moutong | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 105.000.000 | | 221.669.679,18 | | 251.901.647,47 | | 288.054.152,52 | | 331.150.083,24 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 79.978.790,2 | 12 | 91.175.820,83 | 12 | 103.940.435,74 | 12 | 119.419.308,95 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|------------|----|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 35.000.000 | | 79.978.790,2 | | 91.175.820,83 | | 103.940.435,74 | | 119.419.308,95 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 79.978.790,2 | 12 | 91.175.820,83 | 12 | 103.940.435,74 | 12 | 119.419.308,95 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 70.000.000 | 12 | 141.690.888,98 | 12 | 160.725.826,64 | 12 | 184.113.716,78 | 12 | 211.730.774,29 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 35.000.000 | | 67.960.106,25 | | 77.474.521,12 | | 88.320.954,08 | | 101.569.097,19 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 67.960.106,25 | 12 | 77.474.521,12 | 12 | 88.320.954,08 | 12 | 101.569.097,19 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 35.000.000 | | 73.730.782,73 | | 83.251.305,52 | | 95.792.762,7 | | 110.161.677,1 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 73.730.782,73 | 12 | 83.251.305,52 | 12 | 95.792.762,7 | 12 | 110.161.677,1 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 | 03 - UPT Wil. III Poso |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 113.129.565 | | 160.175.412,43 | | 182.020.610,23 | | 208.143.905,17 | | 239.284.422,45 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 39.059.565 | 12 | 62.988.529,7 | 12 | 71.806.923,85 | 12 | 81.859.893,19 | 12 | 94.057.808,68 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 39.059.565 | | 62.988.529,7 | | 71.806.923,85 | | 81.859.893,19 | | 94.057.808,68 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 39.059.565 | 12 | 62.988.529,7 | 12 | 71.806.923,85 | 12 | 81.859.893,19 | 12 | 94.057.808,68 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 74.070.000 | 12 | 97.186.882,73 | 12 | 110.213.686,38 | 12 | 126.284.011,98 | 12 | 145.226.613,77 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 14.070.000 | | 23.456.100 | | 26.739.954 | | 30.483.547,56 | | 35.056.079,69 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 14.070.000 | 12 | 23.456.100 | 12 | 26.739.954 | 12 | 30.483.547,56 | 12 | 35.056.079,69 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 60.000.000 | | 73.730.782,73 | | 83.473.732,38 | | 95.800.464,42 | | 110.170.534,08 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|--|
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 60.000.000 | 12 | 73.730.782,73 | 12 | 83.473.732,38 | 12 | 95.800.464,42 | 12 | 110.170.534,08 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 04 - UPT Wil. IV Morowali | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 136.710.000 | | 132.338.697,15 | | 150.387.441,16 | | 171.970.796,33 | | 197.699.436,09 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 52.750.000 | 12 | 59.825.614,42 | 12 | 68.201.200,44 | 12 | 78.278.481,91 | 12 | 89.953.274,51 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 52.750.000 | | 59.825.614,42 | | 68.201.200,44 | | 78.278.481,91 | | 89.953.274,51 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 52.750.000 | 12 | 59.825.614,42 | 12 | 68.201.200,44 | 12 | 78.278.481,91 | 12 | 89.953.274,51 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 83.960.000 | 12 | 72.513.082,73 | 12 | 82.186.240,72 | 12 | 93.692.314,42 | 12 | 107.746.161,58 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 15.760.000 | | 13.296.300 | | 15.157.782 | | 17.279.871,48 | | 19.871.852,2 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 15.760.000 | 12 | 13.296.300 | 12 | 15.157.782 | 12 | 17.279.871,48 | 12 | 19.871.852,2 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 68.200.000 | | 59.216.782,73 | | 67.028.458,72 | | 76.412.442,94 | | 87.874.309,38 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 68.200.000 | 12 | 59.216.782,73 | 12 | 67.028.458,72 | 12 | 76.412.442,94 | 12 | 87.874.309,38 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 05 - UPT Wil. V Banggai | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 169.736.005 | | 217.940.794,96 | | 247.664.206,96 | | 283.208.561,59 | | 325.579.540,95 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 51.454.811 | 12 | 63.318.887,79 | 12 | 72.183.532,08 | 12 | 83.160.592,23 | 12 | 95.524.376,18 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 51.454.811 | | 63.318.887,79 | | 72.183.532,08 | | 83.160.592,23 | | 95.524.376,18 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 51.454.811 | 12 | 63.318.887,79 | 12 | 72.183.532,08 | 12 | 83.160.592,23 | 12 | 95.524.376,18 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|----------------------|------------------------------------|
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 118.281.194 | 12 | 154.621.907,17 | 12 | 175.480.674,88 | 12 | 200.047.969,36 | 12 | 230.055.164,77 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | 14.740.255,82 | | 16.803.891,63 | | 19.156.436,46 | | 22.029.901,93 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 4.500.000 | 12 | 14.740.255,82 | 12 | 16.803.891,63 | 12 | 19.156.436,46 | 12 | 22.029.901,93 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 113.781.194 | | 139.881.651,35 | | 158.676.783,25 | | 180.891.532,9 | | 208.025.262,84 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 113.781.194 | 12 | 139.881.651,35 | 12 | 158.676.783,25 | 12 | 180.891.532,9 | 12 | 208.025.262,84 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 | 06 - UPT Wil. VI Banggai Kepulauan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 128.000.000 | | 121.198.107 | | 137.727.464,29 | | 157.493.880,66 | | 181.056.621,59 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 63.000.000 | 12 | 52.937.113,36 | 12 | 60.348.309,23 | 12 | 69.281.643,89 | 12 | 79.612.549,31 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 63.000.000 | | 52.937.113,36 | | 60.348.309,23 | | 69.281.643,89 | | 79.612.549,31 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 63.000.000 | 12 | 52.937.113,36 | 12 | 60.348.309,23 | 12 | 69.281.643,89 | 12 | 79.612.549,31 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 65.000.000 | 12 | 68.260.993,64 | 12 | 77.379.155,06 | 12 | 88.212.236,77 | 12 | 101.444.072,28 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 5.000.000 | | 6.150.000 | | 7.011.000 | | 7.992.540 | | 9.191.421 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 6.150.000 | 12 | 7.011.000 | 12 | 7.992.540 | 12 | 9.191.421 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 60.000.000 | | 62.110.993,64 | | 70.368.155,06 | | 80.219.696,77 | | 92.252.651,28 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 60.000.000 | 12 | 62.110.993,64 | 12 | 70.368.155,06 | 12 | 80.219.696,77 | 12 | 92.252.651,28 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 07 - UPT Wil. VII Toli-Toli |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 141.150.000 | | 135.283.532,07 | | 153.733.901,41 | | 175.797.534,98 | | 202.098.695,11 | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 91.500.000 | 12 | 74.283.249,34 | 12 | 84.682.904,25 | 12 | 97.079.398,22 | 12 | 111.572.837,83 | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 91.500.000 | | 74.283.249,34 | | 84.682.904,25 | | 97.079.398,22 | | 111.572.837,83 | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 91.500.000 | 12 | 74.283.249,34 | 12 | 84.682.904,25 | 12 | 97.079.398,22 | 12 | 111.572.837,83 | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 49.650.000 | 12 | 61.000.282,73 | 12 | 69.050.997,16 | 12 | 78.718.136,76 | 12 | 90.525.857,28 | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 4.650.000 | | 5.719.500 | | 6.520.230 | | 7.433.062,2 | | 8.548.021,53 | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 4.650.000 | 12 | 5.719.500 | 12 | 6.520.230 | 12 | 7.433.062,2 | 12 | 8.548.021,53 | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 45.000.000 | | 55.280.782,73 | | 62.530.767,16 | | 71.285.074,56 | | 81.977.835,75 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 45.000.000 | 12 | 55.280.782,73 | 12 | 62.530.767,16 | 12 | 71.285.074,56 | 12 | 81.977.835,75 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 08 - UPT Wil. VIII Buol | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 73.450.000 | | 142.442.286,86 | | 161.868.988,41 | | 185.100.156,13 | | 212.793.086,21 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 27.500.000 | 12 | 58.468.239,31 | 12 | 66.653.792,81 | 12 | 76.554.833,15 | 12 | 87.965.964,78 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 27.500.000 | | 58.468.239,31 | | 66.653.792,81 | | 76.554.833,15 | | 87.965.964,78 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 27.500.000 | 12 | 58.468.239,31 | 12 | 66.653.792,81 | 12 | 76.554.833,15 | 12 | 87.965.964,78 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 45.950.000 | 12 | 83.974.047,55 | 12 | 95.215.195,6 | 12 | 108.545.322,98 | 12 | 124.827.121,43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|---|--|
| | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 24.450.000 | | 42.373.500 | | 48.305.790 | | 55.068.600,6 | | 63.328.890,69 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 24.450.000 | 12 | 42.373.500 | 12 | 48.305.790 | 12 | 55.068.600,6 | 12 | 63.328.890,69 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 21.500.000 | | 41.600.547,55 | | 46.909.405,6 | | 53.476.722,38 | | 61.498.230,74 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 21.500.000 | 12 | 41.600.547,55 | 12 | 46.909.405,6 | 12 | 53.476.722,38 | 12 | 61.498.230,74 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 09 - UPT Wil. IX Tojo Una-Una | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 143.650.000 | | 132.558.271,52 | | 150.636.961,75 | | 172.256.127,7 | | 198.027.456,04 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 60.450.000 | 12 | 49.798.541,91 | 12 | 56.770.337,78 | 12 | 65.248.176,38 | 12 | 74.968.312,02 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 60.450.000 | | 49.798.541,91 | | 56.770.337,78 | | 65.248.176,38 | | 74.968.312,02 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 60.450.000 | 12 | 49.798.541,91 | 12 | 56.770.337,78 | 12 | 65.248.176,38 | 12 | 74.968.312,02 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 83.200.000 | 12 | 82.759.729,61 | 12 | 93.866.623,97 | 12 | 107.007.951,32 | 12 | 123.059.144,02 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 14.700.000 | | 18.081.000 | | 20.612.340 | | 23.498.067,6 | | 27.022.777,74 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 14.700.000 | 12 | 18.081.000 | 12 | 20.612.340 | 12 | 23.498.067,6 | 12 | 27.022.777,74 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 68.500.000 | | 64.678.729,61 | | 73.254.283,97 | | 83.509.883,72 | | 96.036.366,28 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 68.500.000 | 12 | 64.678.729,61 | 12 | 73.254.283,97 | 12 | 83.509.883,72 | 12 | 96.036.366,28 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 10 - UPT Wil. X Donggala | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|---|--|
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 127.295.340 | | 172.320.809,36 | | 195.822.432,42 | | 223.926.541,89 | | 257.428.307,62 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 40.295.340 | 12 | 56.981.058,42 | 12 | 64.958.406,6 | 12 | 74.741.552,45 | 12 | 85.865.569,77 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 40.295.340 | | 56.981.058,42 | | 64.958.406,6 | | 74.741.552,45 | | 85.865.569,77 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 40.295.340 | 12 | 56.981.058,42 | 12 | 64.958.406,6 | 12 | 74.741.552,45 | 12 | 85.865.569,77 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 87.000.000 | 12 | 115.339.750,94 | 12 | 130.864.025,82 | 12 | 149.184.989,44 | 12 | 171.562.737,85 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 40.000.000 | | 49.200.000 | | 56.088.000 | | 63.940.320 | | 73.531.368 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 40.000.000 | 12 | 49.200.000 | 12 | 56.088.000 | 12 | 63.940.320 | 12 | 73.531.368 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 47.000.000 | | 66.139.750,94 | | 74.776.025,82 | | 85.244.669,44 | | 98.031.369,85 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 47.000.000 | 12 | 66.139.750,94 | 12 | 74.776.025,82 | 12 | 85.244.669,44 | 12 | 98.031.369,85 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 11 - UPT Wil. XI Sigi | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 161.400.000 | | 243.736.683,36 | | 276.978.215,13 | | 316.729.667,43 | | 364.115.756,74 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 70.000.000 | 12 | 98.424.765,72 | 12 | 112.204.232,92 | 12 | 128.887.327,7 | 12 | 148.097.066,06 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 70.000.000 | | 98.424.765,72 | | 112.204.232,92 | | 128.887.327,7 | | 148.097.066,06 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 70.000.000 | 12 | 98.424.765,72 | 12 | 112.204.232,92 | 12 | 128.887.327,7 | 12 | 148.097.066,06 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 91.400.000 | 12 | 145.311.917,64 | 12 | 164.773.982,21 | 12 | 187.842.339,73 | 12 | 216.018.690,68 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 21.400.000 | | 46.981.134,91 | | 53.558.493,79 | | 61.056.682,93 | | 70.215.185,36 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|----------------------|------------------------------|
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 21.400.000 | 12 | 46.981.134,91 | 12 | 53.558.493,79 | 12 | 61.056.682,93 | 12 | 70.215.185,36 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 70.000.000 | | 98.330.782,73 | | 111.215.488,42 | | 126.785.656,8 | | 145.803.505,32 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 70.000.000 | 12 | 98.330.782,73 | 12 | 111.215.488,42 | 12 | 126.785.656,8 | 12 | 145.803.505,32 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 | 12 - UPT XII. Morowali Utara |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 157.532.000 | | 108.655.911,73 | | 123.474.727,24 | | 141.195.614,51 | | 162.319.963,42 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 73.361.000 | 12 | 53.383.431,12 | 12 | 60.857.111,48 | 12 | 69.811.532,55 | 12 | 80.228.269,16 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 73.361.000 | | 53.383.431,12 | | 60.857.111,48 | | 69.811.532,55 | | 80.228.269,16 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 12 | 12 | 73.361.000 | 12 | 53.383.431,12 | 12 | 60.857.111,48 | 12 | 69.811.532,55 | 12 | 80.228.269,16 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 0 | 12 | 84.171.000 | 12 | 55.272.480,61 | 12 | 62.617.615,76 | 12 | 71.384.081,96 | 12 | 82.091.694,26 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 0 | 12 | | | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 10.810.000 | | 13.296.300 | | 15.157.782 | | 17.279.871,48 | | 19.871.852,2 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 0 | 12 | 10.810.000 | 12 | 13.296.300 | 12 | 15.157.782 | 12 | 17.279.871,48 | 12 | 19.871.852,2 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 73.361.000 | | 41.976.180,61 | | 47.459.833,76 | | 54.104.210,48 | | 62.219.842,06 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 0 | 12 | 73.361.000 | 12 | 41.976.180,61 | 12 | 47.459.833,76 | 12 | 54.104.210,48 | 12 | 62.219.842,06 | | |
| Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) | Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah (PKB,BBN-KB, P.A.P, Pajak Alat Berat) (%) | 100 | 100 | 1.864.122.910 | 100 | 2.286.813.289,12 | 100 | 2.598.695.667,77 | 100 | 2.971.656.143,15 | 100 | 3.416.247.155,25 | 5.02.0.00.0.00.01.00 | 13 - UPT XIII. Banggai Laut |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 137.570.000 | | 118.961.020,5 | | 135.185.277,3 | | 154.586.843,24 | | 177.714.660,79 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 0 | 12 | 36.000.000 | 12 | 44.327.521,72 | 12 | 50.533.374,76 | 12 | 58.083.674,34 | 12 | 66.736.016,56 | | |
| 5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah | | | | 36.000.000 | | 44.327.521,72 | | 50.533.374,76 | | 58.083.674,34 | | 66.736.016,56 | | |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD) | 0 | 12 | 36.000.000 | 12 | 44.327.521,72 | 12 | 50.533.374,76 | 12 | 58.083.674,34 | 12 | 66.736.016,56 | | |

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penyuluhan Kebijakan dan Pendataan Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 0 | 12 | 101.570.000 | 12 | 74.633.498,78 | 12 | 84.651.902,54 | 12 | 96.503.168,9 | 12 | 110.978.644,23 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 0 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 16.770.000 | | 19.598.820 | | 22.342.654,8 | | 25.470.626,47 | | 29.291.220,44 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 0 | 12 | 16.770.000 | 12 | 19.598.820 | 12 | 22.342.654,8 | 12 | 25.470.626,47 | 12 | 29.291.220,44 | | |
| 5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 84.800.000 | | 55.034.678,78 | | 62.309.247,74 | | 71.032.542,43 | | 81.687.423,79 | | |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 0 | 12 | 84.800.000 | 12 | 55.034.678,78 | 12 | 62.309.247,74 | 12 | 71.032.542,43 | 12 | 81.687.423,79 | | |
| Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Realisasi PAD (%) | 93,94 | 94,44 | 299.999.750 | 94,69 | 528.899.692,5 | 94,94 | 602.945.643,25 | 95,19 | 687.358.037,51 | 95,44 | 790.461.740,63 | 5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | |
| 5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 1.204.367.240 | | 3.084.878.625,5 | | 3.505.604.272,25 | | 4.008.722.764,51 | | 4.608.469.849,63 | | |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen) | 12 | 12 | 76.171.000 | 12 | 155.190.330 | 12 | 176.916.970 | 12 | 201.685.350 | 12 | 231.938.150 | | |
| 5.02.04.1.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 76.171.000 | | 155.190.330 | | 176.916.970 | | 201.685.350 | | 231.938.150 | | |
| Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen) | 12 | 12 | 76.171.000 | 12 | 155.190.330 | 12 | 176.916.970 | 12 | 201.685.350 | 12 | 231.938.150 | | |
| Tersedianya Regulasi dan Penyuluhan Kebijakan PAD | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 223.828.750 | 12 | 373.709.362,5 | 12 | 426.028.673,25 | 12 | 485.672.687,51 | 12 | 558.523.590,63 | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| 5.02.04.1.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 106.091.000 | | 191.991.930 | | 218.870.800,2 | | 249.512.712,23 | | 286.939.619,06 | | |
| Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 106.091.000 | 12 | 191.991.930 | 12 | 218.870.800,2 | 12 | 249.512.712,23 | 12 | 286.939.619,06 | | |
| 5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 117.737.750 | | 181.717.432,5 | | 207.157.873,05 | | 236.159.975,28 | | 271.583.971,57 | | |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 12 | 12 | 117.737.750 | 12 | 181.717.432,5 | 12 | 207.157.873,05 | 12 | 236.159.975,28 | 12 | 271.583.971,57 | | |

4.4 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan panduan utama bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang komprehensif dan terintegrasi, yang mengacu pada visi besar yang terangkum dalam Program Prioritas Pembangunan maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk mengerahkan segala bentuk potensi untuk mendukung dan mewujudkan seluruh cita-cita yang diamanatkan terutama dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Berani Berintegritas, dan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET. |
|-----|----------------------|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Berani Berintegritas | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | |
| | | Meningkatnya Kualitas Penerimaan Pajak Daerah | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | |
| | | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | |
| | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | |
| | | | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | |
| | | Meningkatnya upaya Ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | |
| | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | |
| | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah | |
| | | Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital | Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | |
| | | | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | |
| | | Meningkatnya realisasi pajak daerah (PKB, BBN-KB, PAP, Pajak Alat Berat) | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | |
| | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 13 UPT |
| | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | |
| | | Penagihan Pajak Daerah | | |

4.5 Target keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat ditampilkan dalam Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-----|---|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | 38.79 | 39.21 | 39.57 | 39.85 | 40.04 | 40.23 | |

4.6 Target Keberhasilan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Adapun indikator kinerja dari BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada target pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci PD

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-----|---|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | 38.79 | 39.21 | 39.57 | 39.85 | 40.04 | 40.23 | |

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku Perangkat Daerah serta merupakan penyusunan langkah-langkah yang berisikan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan untuk mencapai tujuan, dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang diharapkan, juga memuat sasaran, indikator kinerja dengan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2029, Badan Pendapatan Daerah terutama dalam mendukung Misi 2 (dua) yaitu **“Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan”**. Penyusunan dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan arah kebijakan 5 (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien demi mewujudkan “Sulteng Nambaso”.

Palu, 18 September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DR. SUHARTANA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670727 198603 1 005